

## ABSTRAK

### **“PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)”**

Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan *Pengadaan Tanah* adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembangunan Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah mendorong warga sekitar untuk melepaskan hak atas tanahnya namun kendalanya adalah mengenai kesepakatan ganti rugi.

Problematisasi penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 2) Bagaimana penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *socio-legal research* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan ganti rugi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dengan ganti rugi atas tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 20.000 / m<sup>2</sup> namun tuntutan warga yaitu sebesar Rp 100.000 / m<sup>2</sup> dan pelaksanaan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yaitu Memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan, Pembentukan tim terpadu oleh pemerintah Kabupaten Batang untuk mempercepat perolehan/ pembebasan lahan, Memberikan pemahaman terhadap hasil AMDAL yang sudah resmi diperoleh dari BLH Provinsi Jawa Tengah melalui aparat desa setempat, Pemahaman tentang manfaat PLTU, serta kebutuhan akan listrik Jawa Bali dan Madura pada tahun 2016 dan Menyalurkan CSR bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU dalam bentuk perbaikan infrastruktur, bantuan air, sosial, dan sebagainya.

Saran kepada Pemerintah agar lebih adil dalam membuat kebijakan penyelesaian masalah *ganti rugi atas tanah* dan mengadakan pengawasan yang teratur kepada instansi pelaksana pembuat kebijakan sehingga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum dapat melindungi kepastian hak atas tanahnya.

**Kata Kunci : *Ganti Rugi, Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, PLTU Batang.***

## ABSTRACT

### "DETERMINATION OF COMPENSATION IN THE IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST (STUDY IN STEAM POWER PLANT IN CENTRAL JAVA PROVINCE DISTRICT ROD)".

Article 1 paragraph 3 of Presidential Decree 65/2006, which referred to the Land Acquisition is any activity to gain ground by providing compensation to the release or surrender of land, buildings, plants and objects relating to the ground. Construction of the power plant project in Central Java Batang encourage local people to relinquish their land rights but the problem is the compensation agreement.

Problematic of this study were 1) How does the process of land acquisition and compensation for the implementation of development for public interest 2) How is the completion of the procurement of land for construction of Steam Power Plant in Batang, Central Java Province.

The method used in this research is the socio-legal research approach that comes from the collection of the data obtained from the primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used were field studies (interviews). Data were analyzed using qualitative data analysis.

The findings of the researchers show that the process of land acquisition and compensation for the implementation of development for public interest, namely the compensation for the land that has been set by the government of Rp 20,000 / m<sup>2</sup>, but the demands of citizens in the amount of Rp 100,000 / m<sup>2</sup> and the implementation of the completion of land acquisition for the construction of Electric Power Plant in Batang Central Java province that provide convenience facilities support through internal meetings with land owners, team formation integrated by the government, Batang to accelerate the acquisition / land acquisition, provide an understanding of the results of the EIA which has officially obtained from BLH Province Central Java through the local village officials, manfat understanding of the power plant, as well as the demand for electricity in Java-Bali and Madura in 2016 and Channelling CSR for communities affected by the construction of the power plant in the form of infrastructure improvements, water supplies, social, and so on.

Suggestions to the Government to be more fair in making policy problem solving compensation for the land and conduct regular monitoring to instasi implementing policy makers so that the compensation of land for public purposes can protect certainty of land rights.

**Keywords : Compensation, Land Procurement for Public Interest, plant stems.**